



VISUALISASI KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI SASARAN PEMBANGUNAN

Oleh : Prof. Dr. H. Tamrin Kamal, M.S

Email; tamrin.1952@gmail.com

ABSTRAC

Powerlessness is the inability of a person or group to change their destiny either due to internal or external factors so that it affects and raises the complexity of the problem. The visualization of powerlessness if narrated can be seen in economic, social, cultural and legal aspects. The solution offered in minimizing powerlessness is empowerment, as an effort to help local people who are powerless in various aspects such as poor living (cultural and structural), unemployment, low human resources, limited natural resources and others. Empowerment is directed so that they can help themselves, or efforts to guide the community so that they consciously learn to lead themselves, solve their own problems, according to their own potential and the potential of existing local resources. This is where the opportunity for social workers (social workers) as an extension of the government or social organizations, to take part in empowerment efforts. Moreover, higher education institutions are concerned with empowerment efforts.

Key Words: Visualization, powerlessness, empowerment

Ketidakberdayaan (*powerlessness*) merupakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk merubah nasib mereka baik dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal sehingga mempengaruhi dan memunculkan kompleksitas permasalahan. Visualisasi ketidakberdayaan jika dinarasikan dapat dilihat dalam aspek ekonomi, aspek Sosial budaya dan hukum. Solusi yang ditawarkan dalam meminimalisir ketidakberdayaan adalah pemberdayaan, sebagai upaya membantu masyarakat setempat yang kurang berdaya dalam berbagai aspek seperti hidup miskin (kultural dan structural), pengangguran, rendah SDM, terbatasnya SDA dan lainnya. Pemberdayaan diarahkan agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk membimbing masyarakat agar mereka sadar belajar memimpin diri mereka sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, sesuai dengan potensi diri dan potensi sumberdaya lokal yang ada. Di sinilah peluang pekerja social (*social worker*) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau organisasi social, untuk berkiprah dalam usaha pemberdayaan. Lebih-lebih lagi lembaga pendidikan tinggi yang concern dengan usaha pemberdayaan.

Key Words : Visualisasi, ketidakberdayaan, pemberdayaan (*empowerment*)

Pendahuluan

Ketidakberdayaan (*powerlessness*) merupakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk merubah nasib mereka baik dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal hingga mempengaruhi dan memunculkan kompleksitas permasalahan, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga ketidakberdayaan dari aspek ekonomi, social, budaya dan politik. Pengertian Ketidakberdayaan adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan sehingga klien sulit mengendalikan situasi yang terjadi (NANDA, 2011).

Pada kehidupan berbangsa, menghadapi ketidakberdayaan masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, untuk menanggulangi kemiskinan, dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan *top down* maupun pendekatan *bottom up*, serta merumuskan berbagai kebijakan program, baik program bantuan sosial maupun program berbasis pemberdayaan. Program pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan masyarakat secara penuh, mulai dari identifikasi masalah, merumuskan, merencanakan sampai kepada tahap pelaksanaan dan evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah sosial, terutama kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi concern utama pemerintah Indonesia mulai pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan sampai Orde Reformasi sekarang ini. Berbagai analisa, pendekatan dan strategi diimplementasikan untuk menghapuskan kemiskinan, tetapi sampai saat ini, angka penduduk miskin masih besar. Menurut data BPS tahun 2019, persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret

2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Hal ini menunjukkan adanya pasang surut kondisi masyarakat miskin.

Meskipun demikian, tidaklah kemudian hal tersebut menjadi sebuah justifikasi untuk membiarkan atau bahkan melanggengkan kemiskinan yang terjadi di republik ini. Pembahasan mengenai kemiskinan dan segala hal yang berkaitan dengannya mulai dari penyebab, penanggulangan dan caranya seperti tidak ada habisnya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa jumlah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya sangat cukup untuk melepaskan rakyatnya dari masalah kemiskinan serta mensejahterakan mereka. Dengan seluruh kekayaan dan potensi yang dimiliki, seharusnya masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Ironisnya, kondisi masyarakat sangat berbeda dengan apa yang diidealkan. Sampai saat ini, kemiskinan justru merupakan masalah utama di tengah-tengah potensi dan kekayaan alam yang berlimpah itu. Kenyataan tersebut memunculkan banyak pertanyaan, apakah benar bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia terutama adalah kemiskinan, atau sebenarnya adalah masalah ketidakadilan distribusi kekayaan? Bagaimana pengaruh globalisasi sistem ekonomi terhadap kemiskinan global? Faktor-faktor apa saja yang dominan dan mempengaruhi kemiskinan dan kompleksitasnya? Usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera dan berdaya? Untuk memahami permasalahan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan pemikiran dan analisis yang komprehensif.

Pada sisi lain, sebetulnya pemerintah, oraganisasi social bersama masyarakat sasaran, perguruan tinggi dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan

ini, berusaha melakukan pembedayaan (*empowerment*). Dengan tidak mengklaim, belum berhasilnya usaha pemberdayaan oleh berbagai badan tadi, kemiskinan belum bisa diatasi secara komprehensif, bahkan kemiskinan muncul dengan masalah baru. Masalah-masalah itu, munculnya kesenjangan yang tajam, ketimpangan kemiskinan kota dan desa. Bahkan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati bertekad untuk terus menurunkan angka kemiskinan. "Jadi kita tidak berhenti di situ, ingin menurunkan lebih lanjut. Masalah pemerataan juga lebih bagus," kata Sri Mulyani.

Apakah karena kurang berhasilnya usaha dalam pengentasan kemiskinan, melalui pemberdayaan oleh berbagai badan? Atau karena pemerintah belum sepenuh hati dalam mengangkat martabat orang-orang miskin, sesuai dengan amanah UUD 1945? Tulisan ini tidak hendak menjawab dari masalah-masalah yang muncul ini, tetapi ingin mengintroduksikan lagi secara visual yang dinarasikan, berkaitan dengan bentuk-bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek, aspek ekonomi, atau aspek IPOLEKSOSBUD secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, maka beberapa rumusan masalah yang akan menjadi focus kajian dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Perspektif Ketidakberdayaan Masyarakat (Dalam Narasi) Secara Konep dan Teori?
2. Apa bentuk ketidakberdayaan masyarakat dari aspek ekonomi, social budaya dan politik?
3. Solusi apa yang dapat ditawarkan dalam menyikapi ketidakberdayaan masyarakat?

PEMBAHASAN

A.Perspektif Ketidakberdayaan Masyarakat Dalam Konsep dan Teori

Melvin and Seeman memberikan definisi ketidakberdayaan (*powerlessness*) yaitu : *the expectancy or probability held by the individual that his own behavior cannot determine the occurrence of the outcomes or*

reinforcements he seeks; yang berarti bahwa harapan atau kemungkinan yang dimiliki oleh seseorang yang perilakunya sendiri tidak mampu menentukan tercapai atau tidaknya hasil atau bantuan yang dicari. Atau lebih dapat dimengerti dengan "*the depiction of man's relation to the larger social order*" yaitu gambaran hubungan seorang manusia dengan tatanan sosial masyarakat yang besar. Sebagaimana didefinisikan oleh Seeman, ketidakberdayaan memiliki 2 aspek, yaitu : Pertama, "*that the person has no confidence in being able to influence the events of his life*". Yang berarti bahwa seseorang tidak memiliki kepercayaan dalam mengubah jalan kehidupannya. (Melvin: 1982) Yang dimaksudkan disini yaitu bahwa pihak luar, lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, pihak yang berwenang tidak memperhatikan kebutuhan dasar mereka dan mereka sendiri tidak dapat mengubah walau sudah berusaha. Aspek pertama ini lebih mengarah pada faktor eksternal atau berasal dari luar diri seseorang.

Sedangkan aspek yang kedua, "*the effect it has upon the individual*". Yang berarti bahwa ketidakberdayaan itu diakibatkan oleh dalam diri individu itu sendiri. Aspek ini lebih mengarah pada faktor internal, yang dapat dikarakterisasikan seperti bersikap apatis, putus asa, kehilangan harapan, depresi, pengucilan diri dan ketiadaan motivasi. Akan tetapi Seeman juga melihat bahwa dari 2 faktor itu ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh pihak luar akan dapat dipahami sedikit demi sedikit berdasarkan pengalaman seseorang akan tetapi seseorang tersebut tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasinya sebagaimana dikatakan oleh Seeman yaitu "*a person will definitely learn less from experiences he conceives to be dominated by outsiders, or by chance, which he feels cannot influence*". Pengertian ketidakberdayaan lainnya yaitu menurut Kalekin dan Fishman (1996:97) dalam Senekal (1970:23) yaitu "*powerlessness refers to a gap existing between what a person wants to do and what that person*

feels capable of doing”, yang berarti ketidakberdayaan adalah jarak yang ada antara apa yang seseorang ingin lakukan dan apa yang seseorang rasa mampu untuk dilakukan. Pendapat Kalekin dan Fishman ini diperjelas juga oleh Seeman yang mengatakan bahwa ketidakberdayaan terkait kedalam hal kemampuan dan ketidakmampuan, baik dari dalam diri sendiri maupun dikarenakan pengaruh dari luar diri orang tersebut. Menurut pendapat ahli lainnya yaitu Robert Chambers yang memasukkan ketidakberdayaan dalam 5 unsur perangkap kemiskinan (*deprivation trap*) yang terdiri dari : 1. Poverty (kemiskinan itu sendiri), 2. Kelemahan fisik, 3. Keterasingan atau kadar isolasi, 4. Kerentanan (*vulnerability*) dan 5. Ketidakberdayaan (*powerlessness*).

Menurut Chambers dalam Suyanto (2010), mengatakan bahwa ketidakberdayaan kaum miskin itu disebabkan oleh ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi kaum yang berkuasa/penguasa atau yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan menjadi kunci dalam perangkap kemiskinan selain dari kerentanan, hal ini dikarenakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk merubah nasib mereka dari kemiskinan akan memperburuk keadaan mereka sendiri selain itu ditambah adanya pengaruh kekuasaan dari luar yang tidak menginginkan masyarakat yang miskin itu untuk berubah atau penguasa itu melakukan penipuan dengan mengatakan akan memberikan perubahan akan tetapi hanya merubah masyarakat yang tidak tahu-menahu malah bertambah menjadi miskin karena kebijakan yang salah. (Robert Chambers : 2013).

Selain beberapa pendapat di atas terdapat beberapa bentuk ketidakberdayaan yang salah satu disebutkan oleh Sadan (1997:116) yang mengatakan bahwa salah satu bentuk ketidakberdayaan adalah ketergantungan ekonomi (*economic dependence*). Sadan mengatakan ketidakberdayaan merupakan kunci untuk proses pemberdayaan sesuai dengan

definisinya tentang pemberdayaan yaitu pemberdayaan individu merupakan proses pembangunan dalam kerangka sosial: yaitu sebuah proses dari ketidakberdayaan dan dari bayang-bayang ketidakberdayaan tersebut kearah kehidupan yang aktif dan berkemampuan untuk bertindak dan untuk mengambil inisiatif dalam hubungan ke lingkungannya dan masa depannya. Salah satu bentuknya yaitu ketergantungan ekonomi, jika seseorang atau masyarakat masih tergantung ekonominya kepada 1 (satu) atau sedikit kegiatan untuk menghidupi keluarganya atau tergantung kepada suatu keadaan dan kekuasaan maka perlu dilakukan pemberdayaan.

Maka apa yang dikatakan oleh Sadan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Seeman dan Rotter mengenai ketidakberdayaan yaitu ketidakberdayaan manusia dalam merubah nasib mereka dikarenakan ketergantungan baik itu berasal dari diri mereka sendiri maupun ketergantungan dari luar. Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian ketidakberdayaan yaitu ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk merubah nasib mereka baik dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal hingga mempengaruhi lingkungan, ekonomi dan masa depannya. (Melvin: 1982)

Pada sisi lain, ada 2 tinjauan mengenai konsep ketidakberdayaan :1. Ketidakberdayaan yaitu ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk merubah nasib mereka dikarenakan *lack of power* yaitu ketiadaan kekuasaan, bahwa seseorang atau kelompok itu tidak memiliki kekuasaan terhadap diri mereka sendiri maupun lingkungan di luar mereka dikarenakan pengetahuan dan pendidikan yang kurang. 2. Kerentanan yaitu ketidakberdayaan karena ketiadaan kontrol diri (*lack of personal control*) yang berarti tidak mampu untuk menguasai diri sendiri baik secara internal maupun eksternal dan ketiadaan motivasi. Akan tetapi Seeman juga melihat bahwa dari 2 faktor itu ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh pihak luar akan dapat dipahami sedikit demi sedikit berdasarkan

pengalaman seseorang akan tetapi seseorang tersebut tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasinya sebagaimana dikatakan oleh Seeman yaitu *“a person will definitely learn less from experiences he conceives to dominated by outsiders, or by chance, which he feels cannot influence”*.

Pengertian ketidakberdayaan lainnya secara teori, dikemukakan oleh Kalekin dan Fishman (1996:97) dalam Senekal (1970:23) yaitu *“powerlessness refers to a gap existing between what a person wants to do and what that person feels capable of doing”*, yang berarti ketidakberdayaan adalah jarak yang ada antara apa yang seseorang ingin lakukan dan apa yang seseorang rasa mampu untuk dilakukan. Pendapat Kalekin dan Fishman ini diperjelas juga oleh Seeman yang mengatakan bahwa ketidakberdayaan terkait kedalam hal kemampuan dan ketidakmampuan, baik dari dalam diri sendiri maupun dikarenakan pengaruh dari luar diri orang tersebut.

B. Ketidakberdayaan Masyarakat Dari Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik

1. Ketidakberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi

Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari *Chambers* menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

a. Kemiskinan (*Property*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

b. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun

persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di manasituasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

d. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

e. Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Dari pengertian yang agak terjabar, bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam

aspek ekonomi ini, Nurnaningsih (2017) menjelaskan dalam artikelnya “*Kemiskinan Semakin Merajalela Di Kalangan Masyarakat*”, Mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan. Kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek social dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa, kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Atau ada pula yang mengatakan bahwa kemiskinan, merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintahan. Sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural).

Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok. Untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Kemiskinan, ketertinggalan dan kebodohan seperti 3 mata uang. Karena kemiskinan, ketertinggalan dan kebodohan lahir secara bersama, karena ketiganya merupakan permasalahan sosial yang ada seperti lingkaran setan (yang salingkait-mengkait). Sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi dan sosial yang semakin parah dan memprihatinkan. Kemiskinan tidak bias dilepaskan dari kebodohan dan ketertinggalan. Demikian pula kebodohan, sangat erat hubungannya dengan kemiskinan dan ketertinggalan, dalam ekonomi dan kemakmuran.

Kemiskinan sendiri seringkali dibagi kedalam dua jenis, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena adanya kebijakan yang membuat miskin, meminggirkan kelompok tertentu sehingga tidak bisa hidup sesuai standar kelayakan ataupun sesuai pilihannya. Sedangkan kemiskinan kultural dianggap sebagai kemiskinan yang terjadi

karena budaya malas, tidak bekerja keras, ataupun memiliki etos kerja yang rendah. Penulis sendiri beranggapan bahwa adanya kemiskinan kultural juga disebabkan oleh pemiskinan struktural. Seseorang tidak memiliki etos kerja bisa jadi karena aksesnya terhadap pendidikan dihambat oleh suatu kebijakan. (BantuanHukum.com) Terdapat 5 bentuk penindasan masyarakat secara ekonomi : eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi budaya dan kekerasan.

Menurut Bambang Ismawan, Ketidakberdayaan juga dimaknai sebagai kemiskinan dan keterbelakangan. Ketidakberdayaan itu ditengarai dengan jumlah anggota masyarakat yang sangat banyak yang tidak terjangkau pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan usaha, sehingga kualitas sumber daya manusia rendah, teknologi rendah, organisasi lemah, permodalan lemah, pendapatan mereka rendah dan rentan terhadap berbagai penyakit. (Bambang Ismawan: 2013)

2. Ketidakberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Sosbud dan Politik

Berkaitan dengan gambaran ketidakberdayaan masyarakat dalam bidang social budaya, sangat sering dilihat dan didengar dari berbagai media tentang berita anak-anak yang tidak bersekolah/putus sekolah, kelaparan, pengangguran yang semakin bertambah, ada bayi busung lapar/*stunting*, masih belum maksimalnya penegakkan hukum oleh lembaga pradilan dan banyak lagi contoh fenomena social yang lain. Pada hal secara yuridis, telah dinyatakan bahwa hak-hak konstitusional akan kesejahteraan rakyat, pekerjaan dan penghidupan yang layak, hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal yang layak huni, lingkungan hidup yang bersih, pelayanan kesehatan, merupakan kewajiban Negara untuk mewujudkannya. Ini adalah kontrak moral Negara dengan bangsanya, bahwa Negara akan menjamin keadilan social dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. (Tamrin Kamal: 2015) Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha

bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan.

Temuan lainnya menunjukkan, adanya politisasi SARA dan penyebaran berita bohong (*hoaks*) menjadi gambaran *sosial budaya* yang perlu segera diatasi. Politisasi SARA berpotensi memunculkan sikap intoleran di dalam masyarakat, sedangkan penyebaran berita bohong berdampak pada terciptanya kondisi yang meresahkan masyarakat sehingga timbul kecurigaan. “Perlu pendidikan politik di masyarakat, kearifan dalam menggunakan media sosial dan juga tak kalah penting adalah keteladanan elit politik,”. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka.

Dalam hal ini, beberapa aspek yang perlu dicermati oleh pemerintah maupun elit politik dalam rangka penguatan kualitas demokrasi adalah partisipasi politik, kebebasan sipil, dan perilaku memilih. “Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih merupakan salah satu aspek yang menonjol yang dapat menentukan kualitas pemilu di Indonesia.”. Hal yang dapat memengaruhi perilaku memilih adalah kecenderungan pemilih milenial, pertimbangan representasi agama muslim dan non-muslim, dan pengaruh religiusitas dalam pilihan politik mereka. (Lipi.go.id: 2019)

Menurut Amin Rais, bila dikaitkan dengan penegakkan keadilan social bagi bangsa ini, betapa menjadi sangat relevannya masalah ini, kalau kita konfrontasikan dengan realitas social ekonomi dan politik yang ada di tanah air sa’at ini. Yang terjadi sekarang adalah fenomena konglomerasi yang tidak pernah terbayangkan 32 tahun yang lalu, sa’at bersama-sama membangun tatanan pemerintahan yang disebut Orde Baru. Imbasnya sekarang di bidang ekonomi,

terjadi usaha monopoli, monopsony, oligopoly, dimana sector-sektor ekonomi yang penting dicengkram oleh segelintir orang yang disebut konglomerat. Hal ini berdampak kepada munculnya ketidakadilan di bidang politik, bidang social ekonomi, bidang HAM dan moral. (Amien Rais: 1998)

C. Solusi Yang Dapat Ditawarkan Dalam Menyakapi Ketidakberdayaan Masyarakat

Di antara solusi yang dapat dilakukan dalam menyakapi ketidakberdayaan masyarakat, adalah dengan berusaha memberdayakan mereka yang lazim disebut dengan *empowerment*. Secara historis, istilah pemberdayaan pertama kali digunakan oleh aktivis Gerakan Black Panther dalam mobilisasi politik di USA pada tahun 1960-an. Selanjutnya, gerakan kaum wanita telah mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan tersebut. Kini konsep pemberdayaan telah masuk dalam berbagai disiplin ilmu termasuk dalam ilmu sosial-ekonomi, baik dalam tataran teori maupun praktek. Sejak era reformasi di Indonesia, konsep pemberdayaan ini bahkan telah menjadi kata yang sangat populer terdengar, sehingga sering mengaburkan makna yang sebenarnya.

Pemberdayaan dapat dimaknai dari *power loss* menjadi *power full*, yang selanjutnya pemberdayaan juga sering dapat dimaknai sebagai; *empowering*, *enabling* dan *protekting*. Makna istilah pemberdayaan dalam artikel ini diartikan sebagai kata dasar dari “empower” atau *empowering*, yang berarti memberi daya kekuatan dan kemampuan atau kekuasaan kepada yang diberdayakan. Ada dua citra pemberdayaan di sini, yaitu: (1) yang memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe inilah yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*), yang digunakan dalam tulisan ini, dan (2) kekuasaan didapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Hal ini disebut sebagai *self-empowerment* atau pemberdayaan

sendiri. Konsep pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah memberi kerangka acuan mengenai mitra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (*capability*) yang melingkup arus sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Tujuannya adalah agar setelah diberdayakan dengan cara ini mereka pada akhirnya dapat berdaya mandiri sesuai kemampuan dasar yang dimilikinya.

Dalam tulisan ini, konsep pemberdayaan dibangun atau dibangkitkan dan diawali dari munculnya konsep paradigma pembangunan mandiri dan sejahtera yang berpusat pada empat sumber (modal utama) sebagai pilar utama pemberdayaan yakni; modal fisik, modal manusia, modal sosial dan modal budaya. Dengan demikian, model pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam artikel ini adalah memberikan hak dan kemampuan yang lebih besar kepada individu atau masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan tersebut dan bukan sebagai obyek saja. Tujuannya adalah untuk menggali segala potensi dasar yang dimiliki oleh warga masyarakat setempat untuk dapat dibangkitkan dan didorong agar mereka lebih mampu berdaya guna serta berdaya saing tinggi secara mandiri dan berkelanjutan. (Siti Maisaroh:)

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut AS Hornbyn dalam Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give *ability* to atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. (As. Hornby:)

Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman *renaissance*, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya

untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar. Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan.

Berdasarkan penjelasan konsep tersebut, maka pemberdayaan (*empowerment*) dalam artikel ini dapat diaplikasikan sebagai upaya membantu masyarakat setempat yang kurang berdaya dalam berbagai aspek seperti hidup miskin (kultural dan structural), pengangguran, rendah SDM, terbatasnya SDA dan lainnya. Pemberdayaan diarahkan agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk membimbing masyarakat agar mereka sadar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut pada akhirnya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sesuai dengan potensi diri dan potensi sumberdaya lokal yang ada.

Di sinilah peluang pekerja social (*social worker*) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau organisasi social, untuk berkiprah dalam usaha pemberdayaan. Lebih-lebih lagi lembaga pendidikan tinggi yang concern dengan usaha pemberdayaan. Kalau untuk UIN Imam Bonjol Padang, kegiatan ini dilakoni oleh prodi Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada strata S1 dan S2. Diharapkan dari perguruan tinggi, muncul bentuk-bentuk pemberdayaan yang sarat dengan usaha penelitian dan teori-teori yang berkembang, namun tidak rumit dalam aplikasinya.

Kesimpulan

Kegiatan pemberdayaan (*empowerment*) tidak akan pernah usai, karena masyarakat kurang mampu/berdaya masih tetap ada. Memang kedua variable ini (kegiatan pemberdayaan dengan masyarakat kurang berdaya), sangat sulit untuk dikatakan di antara keduanya ada yang kurang. Apakah variabel kegiatan pemberdayaan yang kurang berhasil atau masyarakat yang kurang berdaya, memang

sulit untuk diberdayakan ? Penulis tidak ada kapasitas untuk menjawab dari pertanyaan ini, namun dalam kegiatan pemberdayaan hal ini akan ditemukan, masih dijumpai bentuk-bentuk ketidakberdayaan (*powerlessness*) masyarakat.

Di antara bentuk-bentuk ketidakberdayaan masyarakat yang dinarasikan, terlihat dalam aspek ekonomi : Kemiskinan (*Property*), ketidakberdayaan (*Powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*), ketergantungan (*dependency*), dan keterasingan (*Isolation*). Dalam aspek Sosbud dan hukum : gambaran ketidakberdayaan masyarakat dalam bidang social budaya, sangat sering dilihat dan didengar dari berbagai media tentang berita anak-anak yang tidak bersekolah/putus sekolah, kelaparan, pengangguran yang semakin bertambah, ada bayi busung lapar/*stunting*, masih belum maksimalnya penegakkan hokum, belum tegaknya *law enforcement* oleh lembaga pradilan dan banyak lagi contoh fenomena social yang lain.

Solusi yang ditawarkan dalam meminimalisir ketidakberdayaan adalah pemberdayaan, sebagai upaya membantu masyarakat setempat yang kurang berdaya dalam berbagai aspek seperti hidup miskin (kultural dan structural), pengangguran, rendah SDM, terbatasnya SDA dan lainnya. Pemberdayaan diarahkan agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk membimbing masyarakat agar mereka sadar belajar memimpin diri mereka sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, sesuai dengan potensi diri dan potensi sumberdaya lokal yang ada. Di sinilah peluang pekerja social (*social worker*) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau organisasi social, untuk berkiprah dalam usaha pemberdayaan. Lebih-lebih lagi lembaga pendidikan tinggi yang concern dengan usaha pemberdayaan.

B. Saran-Saran

Sebagai implikasi dari tulisan ini, maka sebaiknya orang-orang yang konsern pada kegiatan pemberdayaan, untuk lebih

meningkatkan keilmuan dan menjadikan pengalaman-pengalaman praktisnya, sebagai teman pemandu. Hal ini disebabkan, karena masalah sosial, terutama kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi concern utama pemerintah Indonesia mulai pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan sampai Orde Reformasi sekarang ini. Berbagai analisa, pendekatan dan strategi diimplementasikan untuk menghapuskan kemiskinan, tetapi sampai saat ini, angka penduduk miskin masih besar. Maka sangat diharapkan muncul bentuk pemberdayaan, yang betul-betul dapat mngurangi angka ketidakberdayaan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AS Hornby Cs, *Oxford Advaned Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, hal 282
- Chambers, Robert. 2013. *Rural Development: Putting the Last First*. London and New York:Routledge.
- Gunawan, Sumidiningrat, (1999), *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia; Jakarta
- Ismawan, Bambang, Pemberantasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan, 31 Mei 2011 (*Makalah Seminar Indonesia Tanpa Kemiskinan*)
- Kemmis, Stephen, Cs, *The Action Research Planner : Doing Critical Participatory action Research*, tt, Springer, New South Wales, Australia
- Kamal, Tamrin, *Teologi Sosial Islam : Menimplikasikan Nilai-Nilai Ketuhanan Dalam Kehidupan Sosial Umat*, 2015, IAIN Press, Padang
- Maisaroh, Siti Cs, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budaya Kewirausahaan*, (*Hasil Penelitian*, hal.25)
- Melvin and Seeman, 1982. *On The Meaning of Alienation*. American Sociological Rev. 24:783-91. University of California, Los Angeles.
- Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan Panduan Bagi Praktisi Lapangan*, 2011, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia

- Nurmaningsih, 2017, <https://www.kompasiana.com/nurmaningsih/592ab6b8b793738a6f33a778/>
- Rais, Amin, *Tauhid Sosial : Formula Menggempur Kesenjangan*, Penerbit MIZAN, Bandung, 1998
- Senekal, B.A. 2010. Alienation in Irvine Welsh's *Trainspotting*. Department of Afrikaans & Dutch, German & French University of the Free State. *Literator* 31(1): 19-35.
- 88 WELFARE, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44861258>
- https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi_20091015151035_2384_0
- Sumidiningrat, Gunawan (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Gramedia; Jakarta
- <http://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf>
- http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/JURNAL49.pdf
- <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi-petakan-kondisi-politik-ekonomi-sosial-budaya-dan-keamanan-jelang-pemilu-2019/21420>
- <https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemberdayaan-hukum-untuk-kaum-tertindas/>